

ABSTRAK

Peran NGO (*Non-Governmental Organization*) dalam politik *social upgrading* semakin krusial untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi dalam rantai nilai komoditas kopi global. Perkembangan keterlibatan NGO dalam tata kelola global mencerminkan eksistensi mereka dalam dinamika politik internasional. Di Indonesia dan Filipina, NGO terlibat dalam restrukturisasi kebijakan dan pasar lokal, memperkuat posisi petani kopi kecil di tengah dominasi elit ekonomi dan elit politik. Dengan berfokus pada wilayah NTB (Nusa Tenggara Barat) dan BARMM (*Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao*), penelitian ini menunjukkan bahwa variasi dalam dinamika sosial-politik memengaruhi peran dan pendekatan NGO dalam merestrukturisasi distribusi kekuasaan. NGO di NTB membangun kemitraan dengan petani kopi untuk dapat mendorong restrukturisasi kebijakan yang lebih inklusif, dengan menekankan perlindungan terhadap hak-hak petani melalui advokasi dan kampanye publik, Sedangkan, di BARMM, NGO membangun kemitraan dengan pebisnis kopi lokal untuk membangun struktur pasar kopi yang lebih adil, yang selama ini di dominasi oleh perusahaan kopi raksasa. Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bagaimana NGO dapat menciptakan jaringan kemitraan yang lebih inklusif, yang pada gilirannya menghadirkan perubahan signifikan dalam tata kelola rantai nilai global dan mengatasi tantangan ketidakadilan struktural yang dihadapi petani kopi kecil. Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang dinamika peran NGO dalam politik *social upgrading* dan kontribusinya terhadap perbaikan distribusi kekuasaan dalam rantai nilai komoditas kopi.

Kata Kunci; Politik *Social Upgrading*, *Non-Governmental Organization*, Rantai Nilai Komoditas Kopi, NTB, BARMM

ABSTRACT

The role of Non-Governmental Organizations (NGOs) in the politics of social upgrading is increasingly crucial for addressing injustices within the global coffee value chain. The development of NGO involvement in global governance reflects their presence within international politics. In Indonesia and the Philippines, NGOs are engaged in the restructuring of local policies and markets, reinforcing the position of small coffee farmers amidst the dominance of economic and political elites. Focusing on NTB (West Nusa Tenggara) and BARMM (Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao), this study reveals that variations in socio-political dynamics influence the roles and approaches of NGOs in restructuring power distribution. In NTB, NGOs form partnerships with coffee farmers to advocate for more inclusive policy restructuring, emphasizing the protection of farmers' rights through advocacy and public campaigns. Conversely, in BARMM, NGOs partner with local coffee entrepreneurs to develop a fairer coffee market structure, which has been dominated by large coffee corporations. These differing approaches illustrate how NGOs can create more inclusive partnership networks, leading to significant changes in global value chain governance and addressing the structural injustices faced by small coffee farmers. This research offers new insights into the dynamics of NGO roles in the politics of social upgrading and their contribution to improving power distribution within the coffee commodity value chain.

Keywords: Politic of Social Upgrading, Non-Governmental Organization, Coffee Commodity Value Chain, NTB, BARMM